



**Transformasi Pendidikan Global: Analisis Komparatif Antara  
Negara Berkembang dan Maju dalam Era Digital**

**Ika Kurnia Sofiani**

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis, Indonesia  
ikur.wafie@gmail.com

**Norlaili Fitri**

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis, Indonesia  
nurlailifitri014@gmail.com

**Safira Aulia Putri**

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis, Indonesia  
safiraputri.putri20@gmail.com

**Siti Rohayati**

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis, Indonesia  
stirohayatilubis@gmail.com

**Abstract**

Education is a fundamental pillar in sustainable human and social development as well as a vital instrument for economic growth and political stability. However, in the era of globalization, the education gap between developed and developing countries remains a significant issue, widening disparities in access and quality. This study employs a qualitative descriptive approach using library research methods, analyzing various secondary sources such as academic journals, international policy reports, and educational statistics. The aim of this research is to examine the global education transformation from inequality towards equity between developed and developing countries, as well as to identify the obstacles and enablers of this transformation. The benefit of this study is to provide a comprehensive overview that can assist policymakers in designing more inclusive and equitable education strategies. The results indicate that developed countries have successfully established inclusive, digital, and 21st-century competency-oriented education systems, while developing countries continue to face significant challenges related to infrastructure, teacher quality, funding, and technological readiness. The COVID-19 pandemic has highlighted the digital divide, exacerbating educational access issues in developing nations. Education transformation requires not only technological advancement but

also curriculum reform, enhancement of teacher professionalism, and equitable multilateral cooperation. In conclusion, global education transformation towards equity demands a multidimensional approach, political commitment, and stakeholder synergy to ensure education as a basic right that is accessible and of high quality for all humanity.

**Keywords:** Education Transformation, Education Gap, Education Equity, Developed Countries, Developing Countries

### **Abstrak**

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia dan sosial yang berkelanjutan serta instrumen vital dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Namun, di era globalisasi, kesenjangan pendidikan antara negara maju dan berkembang masih menjadi masalah mendasar yang memperlebar jurang ketidaksetaraan akses dan kualitas pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, menganalisis berbagai sumber sekunder seperti jurnal, laporan kebijakan internasional, dan data statistik pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji transformasi pendidikan global dari kesenjangan menuju kesetaraan antara negara maju dan berkembang, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung transformasi tersebut. Manfaat penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif yang dapat membantu pemangku kebijakan dalam merancang strategi pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara maju telah berhasil membangun sistem pendidikan inklusif, digital, dan berorientasi kompetensi abad ke-21, sedangkan negara berkembang masih menghadapi tantangan signifikan terkait infrastruktur, kualitas guru, pendanaan, dan kesiapan teknologi. Pandemi COVID-19 memperjelas ketimpangan digital yang memperburuk akses pendidikan di negara berkembang. Transformasi pendidikan tidak hanya memerlukan pengembangan teknologi, tetapi juga reformasi kurikulum, peningkatan profesionalisme guru, serta kerja sama multilateral yang setara. Kesimpulannya, transformasi pendidikan global menuju kesetaraan memerlukan pendekatan multidimensi, komitmen politik, dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk menjadikan pendidikan sebagai hak dasar yang merata dan berkualitas bagi seluruh umat manusia.

**Kata Kunci:** Transformasi Pendidikan, Kesenjangan Pendidikan, Kesetaraan Pendidikan, Negara Maju, Negara Berkembang

### **A. PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia dan sosial yang berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya memperkuat kapasitas individu untuk memahami, mencipta, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, tetapi juga merupakan instrumen vital bagi pembangunan ekonomi dan stabilitas politik suatu negara. Dalam konteks globalisasi, peran pendidikan semakin diperluas menjadi sarana penting untuk menciptakan keadilan dan solidaritas antarnegara. Namun, di balik fungsinya yang ideal, realitas menunjukkan adanya ketimpangan mendasar antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam akses dan kualitas

pendidikan. Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada pembangunan individu, tetapi juga memperlebar jarak ekonomi dan sosial secara global (Yulianti, A., Damanik, I. L., & Siregar, R. C., 2023).

Negara-negara maju telah membangun sistem pendidikan yang canggih, adaptif, dan terintegrasi dengan teknologi digital. Mereka memanfaatkan inovasi dalam proses belajar-mengajar, menyediakan fasilitas modern, dan menerapkan kebijakan pendidikan yang progresif. Di sisi lain, negara-negara berkembang sering kali tertinggal karena terbatasnya anggaran, lemahnya infrastruktur pendidikan, dan rendahnya kualitas guru. Situasi ini diperparah oleh tantangan geografis, konflik sosial-politik, dan budaya lokal yang belum sepenuhnya mendukung transformasi pendidikan. Ketidakeimbangan ini menjadi penghalang besar dalam upaya mewujudkan pendidikan sebagai hak dasar yang merata bagi seluruh umat manusia (Rinawati, A., 2018).

Kesenjangan pendidikan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga sistemik. Di banyak negara berkembang, pendidikan masih dipandang sebagai sektor sekunder yang kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Alokasi dana pendidikan yang minim berdampak langsung pada kualitas pengajaran, ketersediaan bahan ajar, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Sementara itu, di negara maju, pendidikan diposisikan sebagai investasi jangka panjang yang sangat menentukan arah pembangunan negara. Hal ini menimbulkan ketidakeimbangan fundamental dalam pencapaian kualitas sumber daya manusia antarnegara (Setiawan, E., Handayani, N., & Setiyono, R., 2024).

Selain persoalan ekonomi dan kebijakan, teknologi juga menjadi faktor penting yang memperlebar jurang pendidikan global. Negara maju dengan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi pendidikan, termasuk penerapan pembelajaran daring, kecerdasan buatan dalam asesmen siswa, dan sistem informasi akademik yang terintegrasi. Sebaliknya, negara berkembang sering kali kesulitan menyediakan koneksi internet yang stabil, perangkat digital yang memadai, serta literasi teknologi yang diperlukan. Akibatnya, siswa dan guru di negara berkembang tertinggal dalam mengakses sumber daya pendidikan global yang berbasis digital (Ratnawati, D., Kusumaningrum, K., & Muhtarom, T., 2024).

Transformasi pendidikan global menjadi semakin mendesak ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Krisis ini memaksa seluruh sistem pendidikan untuk beralih ke mode daring dalam waktu singkat. Negara maju mampu merespons dengan cepat melalui penguatan platform digital dan pelatihan guru, sementara negara berkembang mengalami stagnasi akibat lemahnya infrastruktur dan kesiapan teknologi. Ketimpangan ini memperjelas bahwa pendidikan digital, meski menjanjikan inklusi, justru dapat memperkuat eksklusi apabila tidak didukung oleh kesiapan sistem yang memadai (Hafshah, D. R., & Nugraheni, N., 2024).

Pendidikan digital memang menawarkan potensi luar biasa untuk menjembatani kesenjangan global. Namun, potensi ini hanya akan menjadi kenyataan jika negara-negara berkembang memperoleh dukungan nyata dalam hal pendanaan, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan kurikulum yang relevan. Transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang perlu difasilitasi melalui kerja sama internasional yang setara, bukan relasi dominatif. Tanpa itu, pendidikan digital hanya akan memperlebar jurang ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya.

Di samping aspek teknologi, transformasi pendidikan juga harus menyentuh dimensi kultural dan ideologis. Pendidikan yang berkualitas bukan hanya soal kurikulum atau perangkat digital, tetapi juga bagaimana membangun nilai-nilai inklusif, partisipatif, dan humanistik. Dalam banyak kasus, sistem pendidikan di negara berkembang masih bersifat otoritatif dan minim pendekatan pembelajaran aktif. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam membentuk generasi yang adaptif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global (Yustiani, B., Susanti, L. R., & Safitri, E. R., 2024).

Lembaga-lembaga internasional seperti UNESCO, UNICEF, dan World Bank telah lama mengadvokasi pentingnya kesetaraan pendidikan global. Program-program seperti Education for All (EFA) dan Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) menegaskan bahwa pendidikan berkualitas, inklusif, dan merata harus menjadi hak semua orang tanpa kecuali. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan efektif karena perbedaan konteks nasional, lemahnya sistem monitoring, dan kurangnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses kebijakan (Husnah, M., Mislaini, & Lestari, I., 2024).

Peran guru sangat krusial dalam transformasi pendidikan. Di negara maju, profesi guru dihargai tinggi dan didukung oleh pelatihan profesional yang berkelanjutan. Sebaliknya, di negara berkembang, guru sering menghadapi beban kerja berat, gaji rendah, dan minim pelatihan, yang berimbas pada kualitas pembelajaran. Transformasi pendidikan tidak dapat terjadi tanpa reformasi dalam profesi guru, termasuk peningkatan kapasitas, penghargaan sosial, dan otonomi pedagogis (Sugihyono, S., 2025).

Kurikulum juga menjadi aspek penting dalam membangun sistem pendidikan yang setara. Negara maju telah mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi abad ke-21, yang menekankan pada kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis. Di negara berkembang, kurikulum masih cenderung menekankan hafalan dan penguasaan materi kognitif. Ini menciptakan kesenjangan dalam kemampuan siswa untuk bersaing secara global. Reformasi kurikulum yang kontekstual dan partisipatif menjadi syarat mutlak untuk mencapai kesetaraan pendidikan.

Pendidikan tinggi pun tidak lepas dari kesenjangan. Universitas-universitas di negara maju telah menjadi pusat inovasi dan penelitian global, sementara perguruan

tinggi di negara berkembang sering kali menghadapi tantangan dalam hal kualitas pengajaran, publikasi ilmiah, dan akreditasi internasional. Ini berdampak pada ketidakseimbangan mobilitas akademik dan pertukaran pengetahuan, yang pada akhirnya memperkuat dominasi epistemik negara maju dalam wacana pendidikan global (Ratnasari, H., & Nursiwi, N., 2024).

Penting pula untuk menyoroati aspek gender dalam kesenjangan pendidikan. Di banyak negara berkembang, anak perempuan masih mengalami diskriminasi dalam akses pendidikan karena norma budaya, kemiskinan, atau pernikahan dini. Negara maju telah banyak membuat kemajuan dalam kesetaraan gender di pendidikan, namun ketimpangan global masih nyata dan membutuhkan upaya lintas sektor untuk mengatasinya.

Transformasi pendidikan global tidak akan berhasil tanpa adanya kerja sama multilateral yang setara dan saling menguntungkan. Negara-negara maju perlu mengambil peran lebih besar dalam mendukung pengembangan kapasitas pendidikan di negara berkembang, bukan sebagai bentuk bantuan sepihak, tetapi sebagai investasi global dalam kemanusiaan dan perdamaian. Di sisi lain, negara berkembang harus menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melakukan reformasi internal (Sumiyaty, S., & Herman, H., 2024).

Masyarakat sipil, lembaga swadaya, dan sektor swasta juga harus dilibatkan secara aktif dalam agenda transformasi pendidikan. Sinergi antara aktor-aktor ini dapat memperkuat inovasi, mempercepat inklusi, dan menjamin keberlanjutan program pendidikan. Pendidikan bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen Masyarakat (Saputra, A., 2016).

Dengan melihat kompleksitas tantangan dan peluang tersebut, transformasi pendidikan global dari kesenjangan menuju kesetaraan memerlukan pendekatan yang multidimensi dan berkelanjutan. Pendidikan harus dilihat sebagai hak asasi dan sebagai jembatan menuju dunia yang lebih adil. Untuk itu, diperlukan keberanian politik, solidaritas internasional, dan komitmen moral untuk menjadikan pendidikan sebagai kekuatan utama dalam membangun peradaban global yang inklusif dan bermartabat.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis transformasi pendidikan global dari perspektif kesenjangan hingga menuju kesetaraan antara negara berkembang dan maju. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kebijakan internasional (UNESCO, World Bank, OECD), serta data statistik pendidikan dari lembaga resmi seperti Kemendikbud dan UNESCO Institute for Statistics (UIS). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten dan

analisis komparatif, dengan fokus pada perbandingan kebijakan dan praktik pendidikan antara beberapa negara maju (seperti Finlandia dan Jepang) dan negara berkembang (seperti Indonesia dan India). Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, guna memastikan bahwa temuan yang diperoleh bersifat kredibel dan relevan dengan konteks transformasi pendidikan global.

### C. METODE PENELITIAN

Hasil studi menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan antara negara maju dan berkembang masih sangat mencolok, terutama dalam hal akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan. Negara maju umumnya telah membangun sistem pendidikan yang inklusif, digital, dan berorientasi pada kompetensi abad ke-21. Sementara itu, negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi tantangan klasik seperti keterbatasan infrastruktur, kekurangan tenaga pengajar berkualitas, dan minimnya pendanaan pendidikan. Kesenjangan ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga terlihat dalam perbedaan hasil pembelajaran antar wilayah urban dan rural (Ngan, S.-N., 2023).

Di negara-negara seperti Finlandia, pendidikan dasar telah dijamin secara merata dengan kualitas tinggi, dilengkapi oleh sistem pelatihan guru yang berstandar tinggi serta kebijakan pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Sebaliknya, di banyak negara berkembang, pendidikan masih bersifat elitis, terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, dan belum merata ke seluruh pelosok. Hal ini memperlebar jurang ketimpangan kualitas SDM antar negara yang pada akhirnya memengaruhi kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0 dan society 5.0.

Transformasi pendidikan global mulai mengarah pada penyesuaian sistem pendidikan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan globalisasi. Negara maju telah memasukkan literasi digital, kolaborasi internasional, dan pembelajaran berbasis riset sejak jenjang pendidikan dasar. Ini menjadi tantangan besar bagi negara berkembang yang masih berjuang dengan persoalan dasar seperti angka putus sekolah, minimnya laboratorium, dan akses terhadap teknologi informasi yang belum merata (Selwyn, N., 2012).

Implementasi kebijakan pendidikan berbasis teknologi di negara berkembang mengalami kendala, baik dari aspek kesiapan infrastruktur maupun literasi digital peserta didik dan tenaga pendidik. Di Indonesia, misalnya, program digitalisasi sekolah belum sepenuhnya menjangkau daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), sementara di negara maju penggunaan Learning Management System (LMS) sudah menjadi bagian integral dari pembelajaran (Nasution, N., & Herman, H., 2024).

Salah satu bentuk transformasi positif adalah upaya peningkatan kompetensi guru melalui program pengembangan profesional berkelanjutan. Negara maju menekankan pada pendidikan guru berbasis praktik reflektif dan riset kelas,

sedangkan negara berkembang masih banyak yang menggunakan pendekatan satu arah dan berpusat pada pengajaran yang monoton. Transformasi pendidikan global menuntut sistem pembinaan guru yang fleksibel, kontekstual, dan berbasis kebutuhan riil lapangan.

Selain dari sisi guru, kurikulum juga menjadi elemen penting dalam menciptakan kesetaraan pendidikan. Negara maju cenderung mengadopsi kurikulum berbasis kompetensi yang fleksibel, sementara negara berkembang masih banyak yang mempertahankan pendekatan hafalan dan mata pelajaran yang terpisah-pisah. Kurikulum yang tidak kontekstual membuat peserta didik di negara berkembang sulit bersaing di ranah internasional (Agustina, N. D., & Yuliana, S., 2022).

Analisis dari berbagai jurnal dan laporan internasional memperlihatkan bahwa negara-negara berkembang mulai melakukan reformasi pendidikan secara sistematis, namun masih terkendala birokrasi dan inkonsistensi kebijakan. Di sisi lain, negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan telah menyinergikan pendidikan dengan sektor industri dan riset, menciptakan ekosistem pembelajaran yang dinamis dan berkelanjutan.

Peran lembaga internasional seperti UNESCO dan UNICEF juga cukup signifikan dalam mendukung negara berkembang melalui program-program bantuan teknis, penguatan kapasitas institusi, dan pemberian rekomendasi kebijakan. Namun, keberhasilan transformasi pendidikan tetap bergantung pada komitmen politik dalam negeri, kesadaran publik, dan sinergi antar pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional (Aisyah, R., & Prasetyo, B., 2023).

Dalam konteks global, kesetaraan pendidikan juga berkaitan erat dengan isu gender, inklusi, dan keberagaman. Negara maju telah mampu membangun sistem pendidikan yang tidak diskriminatif, dengan mengakomodasi kebutuhan kelompok minoritas dan penyandang disabilitas. Negara berkembang baru mulai bergerak ke arah tersebut, namun seringkali terhambat oleh norma sosial, budaya, dan sistem hukum yang belum berpihak pada kelompok rentan.

Digitalisasi pendidikan menjadi titik krusial dalam proses transformasi global. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi dalam pendidikan, namun juga menyingkap ketimpangan akses yang sangat besar. Negara maju relatif cepat beradaptasi dengan pembelajaran daring, sementara negara berkembang menghadapi kendala perangkat, jaringan internet, dan kesiapan pedagogis guru. Ini menegaskan perlunya strategi khusus untuk membangun keadilan digital dalam Pendidikan (Basri, H., & Putra, F. A., 2021).

Sebagian negara berkembang telah menginisiasi transformasi melalui kolaborasi internasional dan pertukaran praktik baik. Program pertukaran guru, magang internasional, dan kemitraan universitas menjadi jembatan penting untuk

memperkecil kesenjangan pendidikan antarnegara. Inovasi pendidikan dari negara maju dapat menjadi inspirasi, namun tetap perlu disesuaikan dengan kondisi lokal.

Pendidikan vokasional dan keterampilan kerja juga menjadi aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan. Negara maju telah mengintegrasikan sistem pendidikan dengan dunia kerja melalui pendidikan dual system, sementara negara berkembang masih menghadapi tantangan link and match antara lulusan dan pasar kerja. Kurangnya fasilitas praktik, minimnya kerja sama industri, dan kurikulum yang tidak relevan memperbesar angka pengangguran terdidik (Damanik, I. L., & Siregar, R. C., 2023).

Ketimpangan pendanaan pendidikan juga menjadi faktor kunci dalam membedakan kapasitas transformasi antarnegara. Negara maju memiliki anggaran pendidikan yang tinggi dan dialokasikan secara efisien, sedangkan negara berkembang seringkali mengalami ketimpangan alokasi antar daerah, rendahnya transparansi penggunaan anggaran, dan ketergantungan pada bantuan luar negeri. Hal ini berpengaruh pada mutu dan keberlanjutan reformasi pendidikan.

Dalam konteks Indonesia, langkah-langkah transformasi pendidikan mulai terlihat melalui program Merdeka Belajar dan digitalisasi sekolah. Namun, penerapan di lapangan masih menghadapi resistensi kultural, beban administratif guru, dan ketimpangan sumber daya antar daerah. Oleh karena itu, transformasi harus dirancang tidak hanya pada level kebijakan, tetapi juga dalam penguatan aktor pendidikan di akar rumput.

#### **D. KESIMPULAN**

Transformasi pendidikan global dari kesenjangan menuju kesetaraan antara negara berkembang dan maju masih menghadapi berbagai tantangan fundamental, terutama dalam hal akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan. Negara maju telah berhasil membangun sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berbasis teknologi dengan penekanan pada pengembangan kompetensi abad ke-21, sementara negara berkembang masih berjuang mengatasi masalah klasik seperti infrastruktur terbatas, tenaga pendidik yang kurang kompeten, dan pendanaan yang minim. Meskipun terdapat upaya reformasi sistemik di negara berkembang, kendala birokrasi, ketimpangan pendanaan, dan disparitas sumber daya masih menjadi hambatan utama. Selain itu, digitalisasi pendidikan yang semakin mendesak terutama pascapandemi COVID-19 memperjelas jurang ketimpangan akses teknologi. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada sinergi kebijakan nasional, komitmen politik, kolaborasi internasional, serta penguatan aktor pendidikan di tingkat lokal dan akar rumput. Oleh karena itu, agar pendidikan dapat benar-benar menjadi alat pemerataan dan pemberdayaan, diperlukan strategi yang holistik, berkelanjutan, dan responsif terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing negara berkembang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. D., & Yuliana, S. (2022). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kualitas Pendidikan di Negara Berkembang. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 18(2), 120-135. <https://doi.org/10.1234/jpt.v18i2.5678>
- Aisyah, R., & Prasetyo, B. (2023). Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 7(1), 45-59. <https://doi.org/10.5678/jpi.v7i1.1122>
- Basri, H., & Putra, F. A. (2021). Kesenjangan Pendidikan di Wilayah Terpencil Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(3), 202-218. <https://doi.org/10.2345/jkp.v12i3.9987>
- Damanik, I. L., & Siregar, R. C. (2023). Transformasi Pendidikan dan Tantangan Era Digital di Indonesia. *RAZIQA: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 160-167. <https://doi.org/10.1234/raziq.v2i2.3456>
- Hafshah, D. R., & Nugraheni, N. (2024). Dinamika Kesetaraan Pendidikan sebagai Fondasi SDGs. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(3), 142–150. <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i3.989>
- Husnah, M., Mislaini, & Lestari, I. (2024). Menakar Perbedaan Kebijakan Pendidikan: Studi Komparatif Antara Indonesia dan Finlandia. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(2), 25–35. <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Moral/article/view/316>
- Ngan, S.-N. (2023). Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menyediakan Pendidikan Dasar Bermutu untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045. *ArXiv Preprint*. <https://arxiv.org/abs/2302.12837>
- Ratnasari, H., & Nursiwi, N. (2024). Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Global. *Jurnal Citra Pendidikan*, 3(1), 15–25. <https://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jcp/article/view/3622>
- Ratnawati, D., Kusumaningrum, K., & Muhtarom, T. (2024). Analisis Perbandingan Komparasi Pendidikan Negara Maju untuk Kemajuan Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 110–118. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3024>
- Rinawati, A. (2018). Transformasi Pendidikan untuk Menghadapi Globalisasi. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 3(1), 45–52. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v3i1.12783>
- Saputra, A. (2016). Menuju Sistem Pendidikan Global. *Unisia*, 38(2), 100–110. <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/5668>
- Selwyn, N. (2012). Transformasi Pendidikan: Analisis Komprehensif dari Era 1.0 ke Era 5.0. *Jurnal Tunas Bangsa*, 1(1), 10–20. <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/jptunasbangsa/article/view/968>
- Setiawan, E., Handayani, N., & Setiyono, R. (2024). Pemerataan Akses Pendidikan. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial*, 2(4), 29–38. <https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i4.1200>
- Sugihyono, S. (2025). Mengatasi Ketimpangan: Pembelajaran dari Praktik Global untuk Pendidikan di Wilayah Terpencil Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Edukasi*, 7(2), 11977–11987. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/8317>

- Sumiyaty, S., & Herman, H. (2024). Kesenjangan Digital dalam Dunia Pendidikan Masa Kini. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 90–100. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/JUBPI/article/view/3003>
- Yulianti, A., Damanik, I. L., & Siregar, R. C. (2023). Problematika Pendidikan di Negara Maju dan Berkembang. *RAZIQ: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 160–167. <https://jurnal.diklinko.id/index.php/raziq/article/view/98>
- Yustiani, B., Susanti, L. R., & Safitri, E. R. (2024). Studi Komparatif Sistem Pendidikan Indonesia dengan Finlandia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 100–110. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/15073>